

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2014

## OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
  - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
  - 1.2 Pengurangan Pengangguran
  - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
  - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
  - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
  - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
  - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
  - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
  - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
  - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
  - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
  - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
  - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
  - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
  - 5.1 Isu Strategis Daerah
  - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH



# Perkembangan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2014

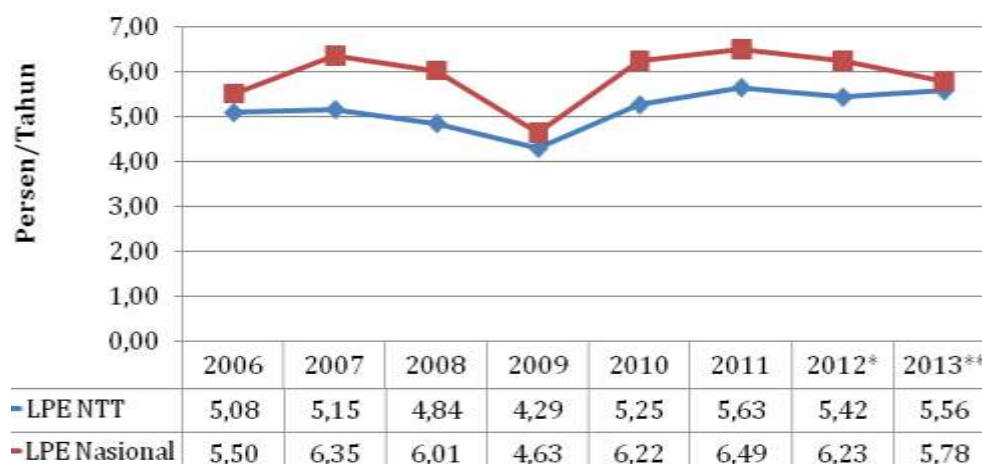
## SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

### A. Perkembangan Indikator Utama

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi sumber daya alam beragam namun pemanfaatannya belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Potensi pariwisata di Flores tersebar di setiap daerah, tetapi potensi tersebut belum memberikan sumbangan secara signifikan terhadap perekonomian Nusa Tenggara Timur. Kinerja perekonomian Nusa Tenggara Timur selama periode 2006-2013 tergolong kurang, terlihat laju pertumbuhan rata-rata selama periode tersebut sebesar 5,15 persen lebih rendah dari nasional sebesar 5,90 persen (Gambar 1). Di tingkat wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur menyumbang sebesar 41,58 persen terhadap PDRB Nusa Tenggara, dan memberikan sumbangan sebesar 0,52 persen terhadap pembentukan PDB Nasional pada tahun 2013.

**Gambar 1**  
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000



Sumber: BPS, 2013

Kurangnya laju pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur mengakibatkan kesenjangan pendapatan perkapita dari angka rata-rata nasional. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB perkapita Nusa Tenggara Timur dan PDB nasional sebesar 26,21 persen, maka pada tahun 2012 rasionya menurun menjadi 21,48 persen (Gambar 2). Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

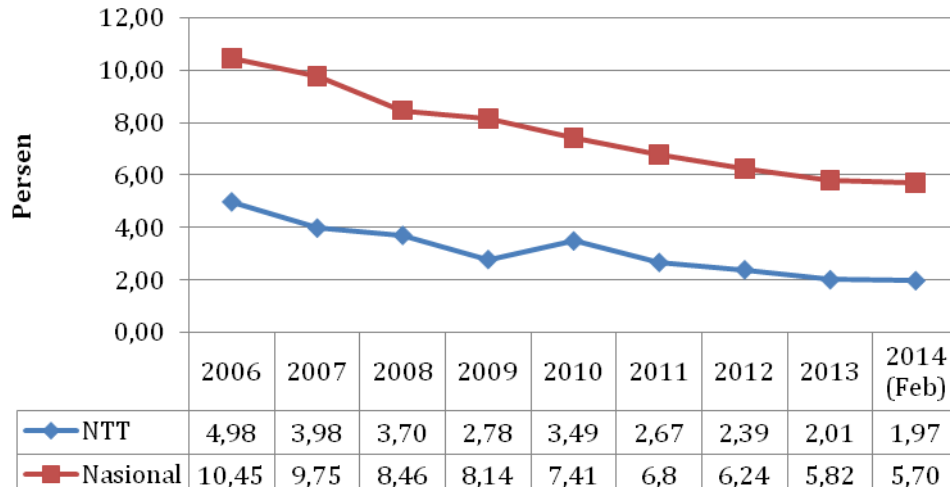


Sumber: BPS, 2013

## 2. Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur selama 2006-2013 berkurang sebesar 2,97 persen. Meskipun laju pertumbuhan ekonominya rendah, tingkat pengangguran di Nusa Tenggara Timur cenderung menurun (Gambar 3). Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional, TPT Nusa Tenggara Timur termasuk rendah karena berada di bawah rata-rata TPT nasional. Rendahnya tingkat pengangguran dengan pendapatan perkapita yang rendah mengindikasikan rendahnya produktivitas pekerja di tingkat daerah.

**Gambar 3**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**

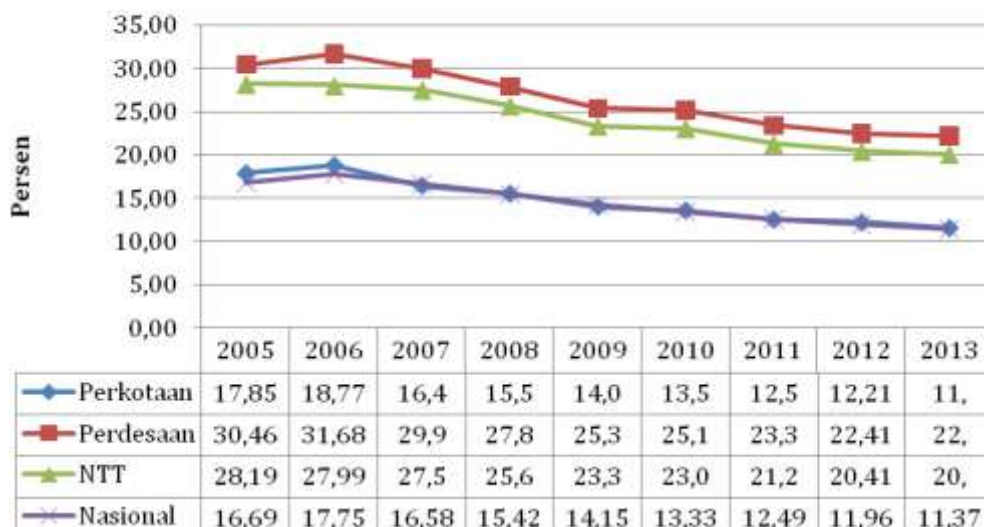


Sumber: BPS, 2014

### 3. Pengurangan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur berada di atas rata-rata nasional. Selama kurun waktu 2006-2013 persentase penduduk miskin di provinsi ini cenderung berkurang walaupun memiliki angka kemiskinan yang tinggi (Gambar 4). Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur mencapai 20 persen sedangkan kemiskinan di tingkat nasional sebesar 11,37 persen. Kemiskinan dipengaruhi oleh sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, di samping terbatasnya lapangan kerja serta terbatasnya dukungan sistem kelembagaan sosial dan ekonomi.

**Gambar 4**  
**Persentase Penduduk Miskin**



Sumber: BPS, 2014

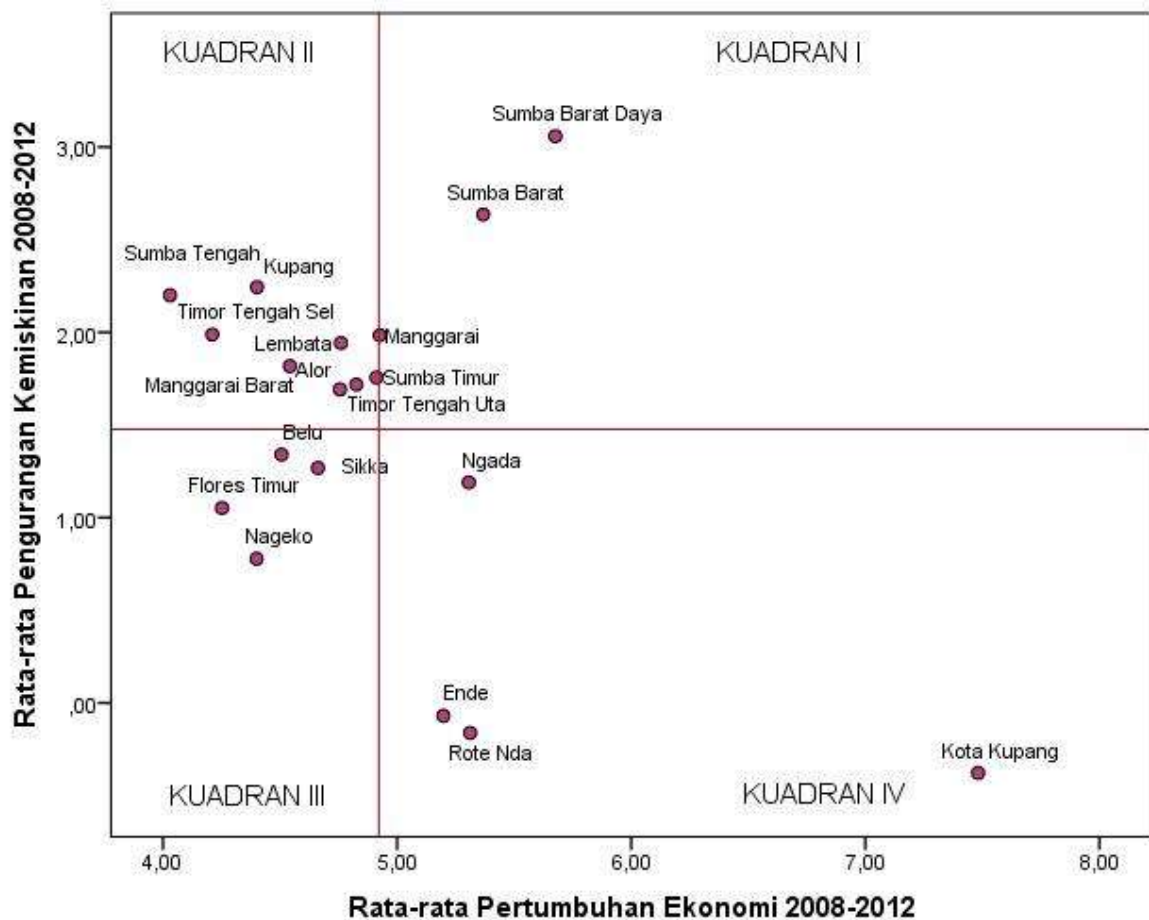
## B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , serta perluasan lapangan kerja.

### 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Manggarai termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

**Gambar 5**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)



*Kedua*, Kabupaten Sumba Tengah, Kupang, Timor Tengah Selatan, Lembata, Alor, Manggarai Barat, Timor Tengah Utara, dan Sumba Timur yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

*Ketiga*, Kabupaten Belu, Flores Timur, Sikka, dan Nageko terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

*Keempat*, Kabupaten Ngada, Ende, Rote Nda, dan Kota Kupang terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

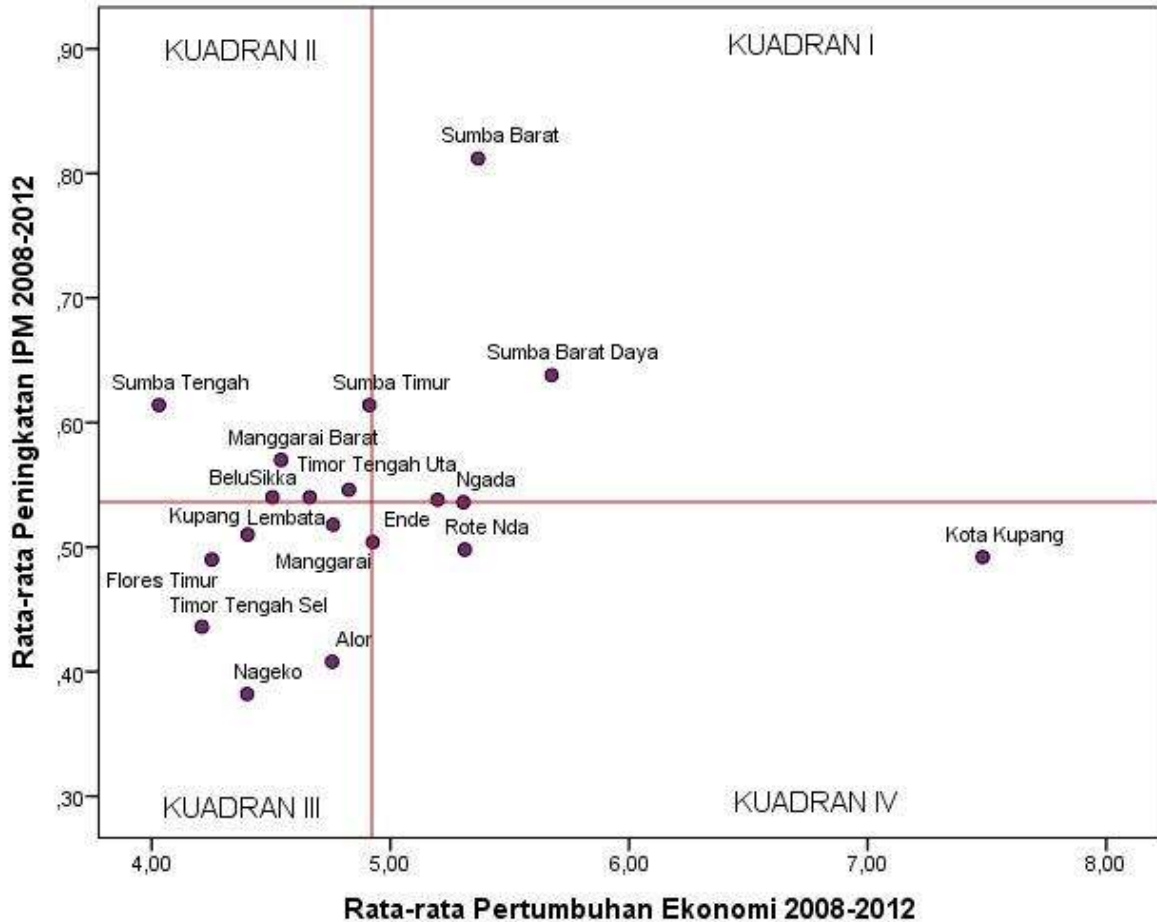
## **2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM**

Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Ngada, dan Ende merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

*Kedua*, Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Timur, Manggarai Barat, Timor Tengah Utara, Belu, dan Sikka yang terletak di kuadran II merupakan kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi

melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

**Gambar 6**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

*Ketiga*, Kabupaten Kupang, Lembata, Flores Timur, Timor Tengah Selatan, Nageko, dan Alor terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

*Keempat*, Kabupaten Roe Nda, Manggarai, dan Kota Kupang terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

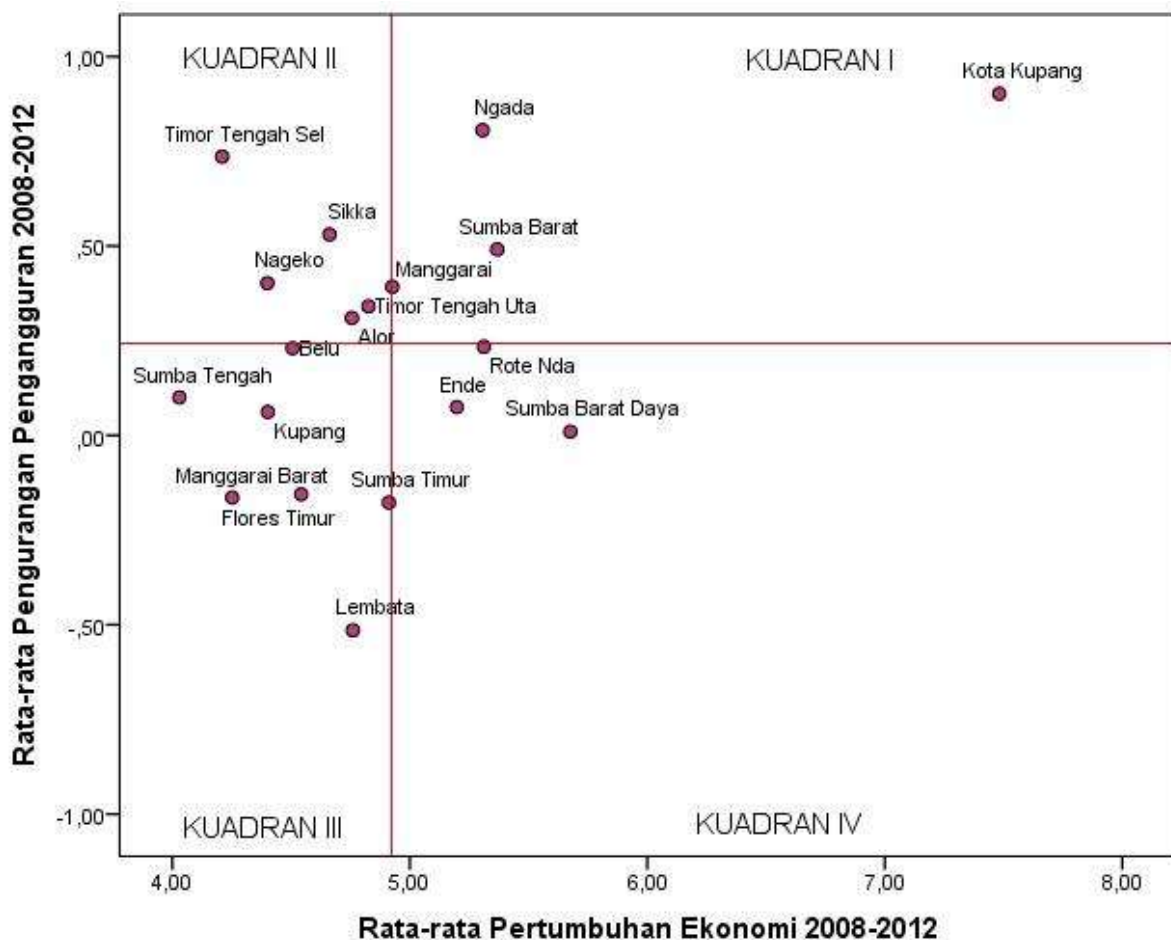


### 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Ngada, Sumba Barat, Manggarai, dan Kota Kupang terletak di kuadran I, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

*Kedua*, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Sikka, Nageko, dan Alor yang terletak di kuadran II merupakan kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

**Gambar 7**  
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

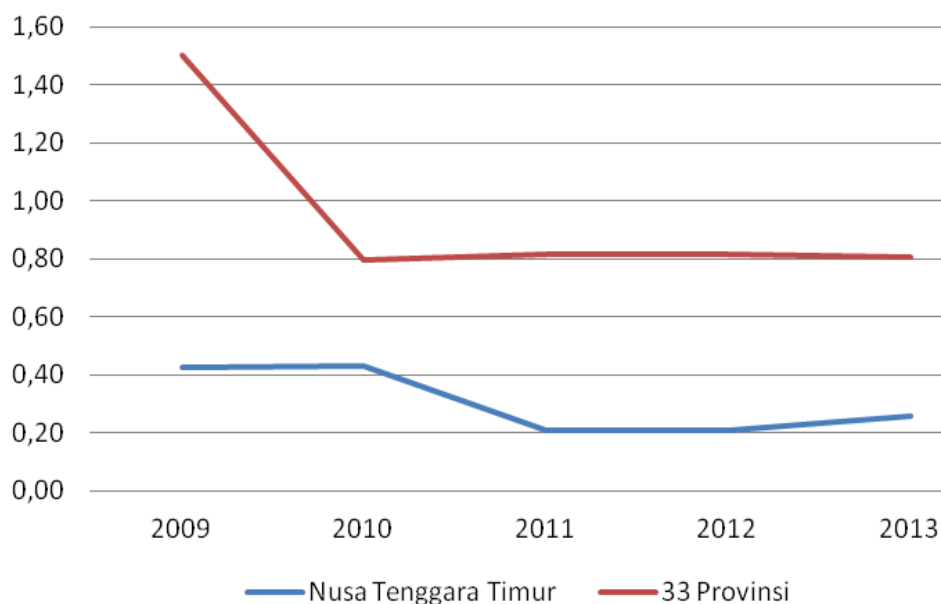
Ketiga, Kabupaten Sumba Tengah, Belu, Kupang, Manggarai Barat, Flores Timur, Sumba Timur, dan Lembata terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Keempat, Kabupaten Ende, Sumba Barat Daya terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan.

#### 4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur berkategori sedang, menunjukkan perekonomian di kabupaten/ kota di provinsi ini belum merata. Nilai indeks williamson dari tahun 2009-2013 Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung meningkat walaupun masih berada di bawah rata-rata nasional. Penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial di Nusa Tenggara Timur adalah rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama untuk masyarakat di perdesaan. Ketimpangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan juga ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan karakteristik kepulauan membutuhkan biaya pembangunan lebih besar untuk membangun infrastruktur penunjang seperti transportasi dan energi.

**Gambar 8**  
**Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Indikasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah. Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Nusa Tenggara Timur cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 1). Karakteristik daerah kepulauan mengakibatkan banyak warga yang sukar dicapai oleh sarana dan prasarana sosial ekonomi. Keterbatasan jalan membuat warga sukar untuk saling berhubungan dan memperoleh pelayanan yang seharusnya disediakan pemerintah. Kota Kupang sebagai ibukota provinsi memiliki PDRB per kapita tinggi, jauh meninggalkan daerah lain di provinsi ini. Kota Kupang terus berkembang menjadi pusat lalu lintas barang, layanan jasa, serta pusat pengembangan wilayah NTT.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2007-2012 (000/jiwa)**

<b>Kab/ Kota</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Sumba Barat	4.613	5.164	5.781	6.432	7.205	8.009
Sumba Timur	4.650	5.342	5.834	6.443	7.240	8.100
Kupang	4.660	5.183	5.793	6.904	7.658	8.620
Timor Tengah Selatan	3.574	4.100	4.573	5.047	5.651	6.344
Timor Tengah Utara	3.039	3.341	3.678	4.047	4.442	4.894
Belu	4.168	4.435	4.842	5.235	5.644	6.096
Alor	3.379	3.574	3.925	4.381	4.859	5.374
Lembata	2.472	2.782	3.101	3.459	3.892	4.319
Flores Timur	4.802	4.939	5.437	6.043	6.933	7.716
Sikka	4.103	4.532	4.972	5.520	6.111	6.694
Ende	4.593	5.236	5.852	6.530	7.259	8.317
Ngada	4.725	5.400	5.963	6.667	7.320	8.026
Manggarai	2.817	3.444	3.848	4.200	4.622	5.067
Rote Ndao	4.436	4.229	4.541	4.950	5.553	6.041
Manggarai Barat	3.525	3.944	4.263	4.557	4.903	5.264
Sumba Barat Daya	2.395	2.630	2.934	3.251	3.688	4.211
Sumba Tengah	3.212	3.716	4.201	4.874	5.381	5.987
Nagekeo	3.538	4.507	4.892	5.531	5.868	6.485
Manggarai Timur	-	2.796	3.036	3.412	3.829	4.364
Sabu Raijua	-	-	-	4.429	5.241	5.381
Kota Kupang	10.298	11.333	12.355	13.850	15.673	17.427
<b>NTT</b>	<b>4.331</b>	<b>4.804</b>	<b>5.251</b>	<b>5.897</b>	<b>6.533</b>	<b>7.249</b>

*Sumber: BPS, 2013*

## **C. Penyebab Permasalahan Pembangunan**

### **1. Ketergantungan pada sektor pertanian**

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah, terutama potensi ekonomi untuk diberdayakan sesuai dengan kemampuan daerah dan prospek di masa mendatang. Struktur perekonomian Nusa Tenggara Timur tahun 2013 didominasi sektor pertanian, jasa-jasa, dan perdagangan (Tabel 2).

**Tabel 2**  
**Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	35,15	34,18
2.	Pertambangan	1,34	1,34
3.	Industri Pengolahan	1,46	1,38
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,45	0,46
5.	Konstruksi	7,15	6,34
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	18,33	18,19
7.	Angkutan, Telekomunikasi	5,68	7,52
8.	Keuangan	4,37	4,10
9.	Jasa-jasa	26,07	26,50
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

Kontribusi sektor industri pengolahan dan utilitas pendukungnya (listrik, gas, dan air minum) besarnya di bawah 5 persen. Dalam analisis sektor basis, sektor pertanian juga memiliki peran yang kuat dalam perekonomian. Apabila ditelusuri lebih lanjut, sektor basis daerah antara lain pertanian dan jasa-jasa (Tabel 3). Di antara sektor-sektor *tradable* (dapat diperdagangkan antardaerah), komoditas tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, semuanya memiliki nilai *Location Quotient* lebih besar dari satu ( $LQ > 1$ ). Hal ini menunjukkan Nusa Tenggara Timur memiliki *proportional share* lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sub sektor tersebut, sebaliknya kelompok sektor industri pengolahan memiliki nilai  $LQ < 1$ .

**Tabel 3**  
**Nilai LQ Sektor Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008-2012**

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan</b>	2,89	2,85	2,85	2,81	2,80
a. Tanaman Bahan Makanan	2,90	2,82	2,83	2,78	2,74
b. Tanaman Perkebunan	2,10	2,13	2,10	2,06	2,05
c. Peternakan	6,57	6,53	6,55	6,50	6,60
d. Kehutanan	0,32	0,33	0,33	0,34	0,37
e. Perikanan	1,71	1,73	1,69	1,64	1,65
<b>2. Pertambangan dan Penggalian</b>	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan Bukan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penggalian	1,37	1,33	1,39	1,35	1,36
<b>3. Industri Pengolahan</b>	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
<b>4. Listrik, Gas &amp; Air Bersih</b>	0,53	0,51	0,54	0,58	0,59
a. Listrik	0,60	0,63	0,67	0,72	0,71
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	1,05	1,02	1,05	1,10	1,08
<b>5. Konstruksi</b>	1,01	0,98	0,96	0,97	0,98
<b>6. Perdagangan, Hotel &amp; Restoran</b>	0,94	0,98	0,98	0,98	0,98
a. Perdagangan Besar dan Eceran	1,10	1,16	1,15	1,15	1,14
b. Hotel	0,29	0,30	0,30	0,29	0,29
c. Restoran	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13
<b>7. Pengangkutan dan Komunikasi</b>	0,91	0,83	0,79	0,77	0,74
a. Pengangkutan	1,59	1,59	1,57	1,55	1,54
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	2,53	2,48	2,47	2,43	2,39
3). Angkutan Laut	2,05	2,15	2,29	2,40	2,47
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,90	0,86	0,87	0,90	0,91
5). Angkutan Udara	0,28	0,45	0,43	0,42	0,43
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,75	0,74	0,76	0,77	0,78
b. Komunikasi	0,35	0,30	0,29	0,28	0,27
<b>8. Keuangan, Real Estate &amp; Jasa Perusahaan</b>	0,38	0,38	0,39	0,41	0,41
a. Bank	0,44	0,46	0,49	0,51	0,52
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	1,06	1,03	1,07	1,09	1,10
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29
e. Jasa Perusahaan	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
<b>9. Jasa-jasa</b>	2,56	2,57	2,63	2,73	2,78
a. Pemerintahan Umum	4,26	4,38	4,59	4,88	5,17
b. Swasta	1,24	1,19	1,18	1,17	1,15
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	2,99	2,90	2,96	2,99	2,99
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,71	0,67	0,64	0,61	0,59

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Beberapa indikator di atas menekankan pentingnya pengembangan sektor industri pengolahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu industri pengolahan berbasis pertanian karena kontribusinya yang tinggi terhadap perekonomian. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. *Pertama*, sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan

pendapatan. *Kedua*, sektor industri pengolahan sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan lapangan kerja.

Selama periode 2010-2014 seluruh sektor perekonomian di Nusa Tenggara Timur mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan. Peningkatan terbesar pada perubahan jumlah orang yang bekerja Di Nusa Tenggara Timur adalah pada sektor pertanian, perdagangan, bangunan, angkutan dan telekomunikasi (Tabel 4). Ke depan, sektor industri pengolahan masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian yang kurang produktif. Pengembangan sektor produksi tetap harus memperhatikan RTRW yang telah ditetapkan sehingga tidak menciptakan alih fungsi lahan pertanian produktif di Nusa Tenggara Timur. Selain sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi juga memiliki potensi yang besar untuk di tingkatkan. Peran sektor ini cukup strategis dalam meningkatkan mobilitas dan distribusi barang dan jasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Tabel 4**  
**Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014**

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	1.463.896	1.519.547	55.651
2	Pertambangan	27.415	29.823	2.408
3	Industri Pengolahan	111.313	114.685	3.372
4	Listrik, Gas, Air	2.860	6.840	3.980
5	Bangunan	61.375	77.840	16.465
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	147.282	198.998	51.716
7	Angkutan & Telekomunikasi	84.759	100.204	15.445
8	Keuangan	11.511	18.697	7.186
9	Jasa-Jasa	264.821	269.578	4.757
<b>Total</b>		<b>2.175.232</b>	<b>2.336.212</b>	<b>160.980</b>

Sumber: BPS, 2014

## 2. Kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi tahun 2013 adalah pada konsumsi rumah tangga (Tabel 5). Sektor investasi (PMTB) sebagai sektor yang penting bagi pertumbuhan daerah hanya berkontribusi 11 persen. Investasi akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Stok kapital di daerah yang digunakan untuk memproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam daerah tergantung dari besarnya investasi dan kemampuan sumber daya manusia dalam memaksimalkan potensi dan peluang investasi.



**Tabel 5**  
**PDRB Menurut Penggunaan 2013**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	41,46	39,82
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	2,25	2,09
3.	Konsumsi Pemerintah	13,21	10,49
4.	PMTB	11,41	8,05
5.	Perubahan Stok	10,28	14,22
6.	Ekspor	23,26	28,61
7.	Impor	1,86	3,28
	Total	100,00	100,00

*Sumber : BPS, 2013*

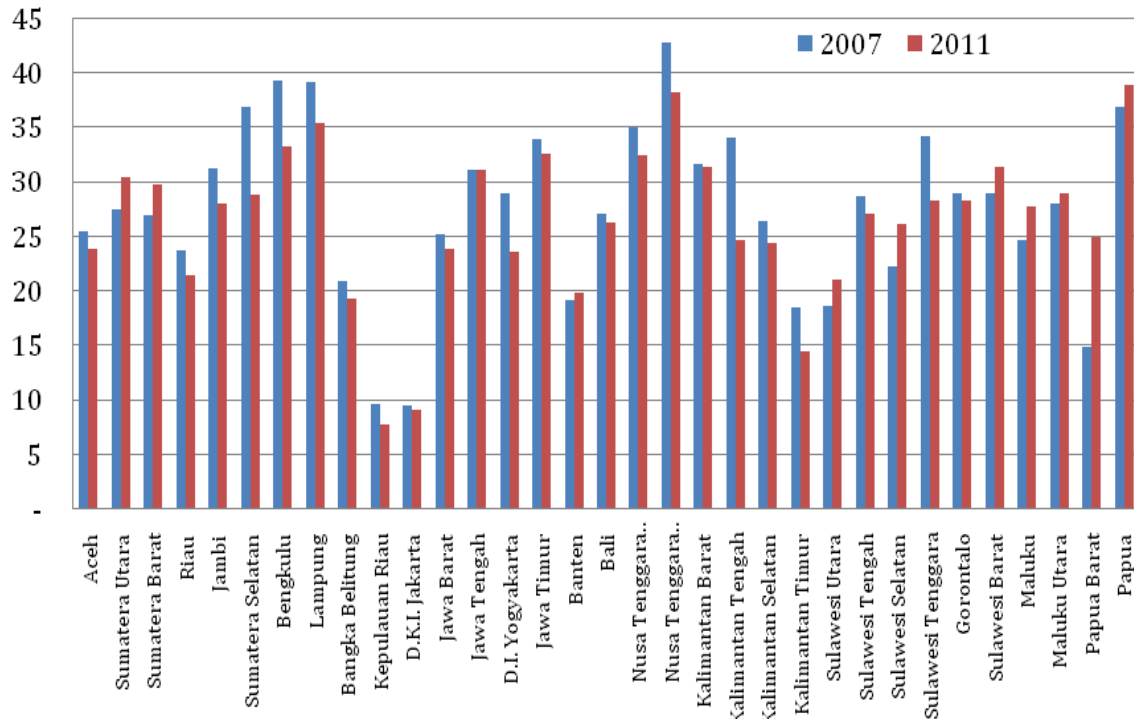
Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Salah satu indikatornya adalah kemudahan pelayanan perijinan. Meskipun semua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun masih perlu dipastikan bahwa implemmentasi PTSP tersebut dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, baik dalam hal biaya maupun waktu yang dibutuhkan. Selain itu, kejelian Daerah dalam menawarkan keunggulan daerahnya akan menjadi daya tarik yang sangat baik bagi investor.

### **3. Rendahnya Kualitas lapangan Kerja**

Kualitas lapangan kerja ditunjukkan dari banyaknya pekerja yang bekerja di sektor informal. Mereka ini terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap sedikit saja guncangan ekonomi yang terjadi. Porsi pekerjaan kurang berkualitas di Nusa Tenggara Timur tergolong tinggi secara nasional dan mencapai 38 persen pada tahun 2011 (Gambar 9).

Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas lapangan kerja adalah dengan memperluas kesempatan kerja formal, memperlancar perpindahan pekerja dari pekerjaan yang produktivitasnya rendah ke pekerjaan yang produktivitasnya tinggi, dan mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja yang masih berada di sektor informal dan mempersempit kesenjangan upah pada tingkat produktivitas yang sama. Kebijakan pembangunan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan kebijakan pembangunan sektor industri yang berbasis agrobisnis dan agroindustri.

**Gambar 9**  
**Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas**



Sumber: BPS, 2012

#### 4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Pembangunan ekonomi juga membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Karakteristik Nusa Tenggara Timur yang berbentuk kepulauan membuat transportasi laut cukup berperan dalam mendukung mobilisasi di wilayah ini. Untuk interkoneksi transportasi darat secara keseluruhan wilayah Nusa Tenggara Timur dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 6.519 km. Jika dilihat dari sisi kuantitas, ketersediaan jaringan jalan di NTT untuk mendukung transportasi darat cukup memadai. Hal ini terlihat dari indikator kerapatan jalan, yang menunjukkan rasio panjang jalan dalam kilometer terhadap luas wilayah dalam kilometer persegi, dan dinyatakan dalam persen (Tabel 6). Sementara itu ketersediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyebrangan untuk mendukung transportasi antar pulau juga masih belum memadai dan kualitasnya relatif masih kurang baik.

Tingkat defisiensi infrastruktur wilayah dapat dianalisis dengan membandingkan daerah dengan tingkat pendapatan per kapita setara. Hal ini didasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kerapatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian. Dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan positif antara PDRB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 10). Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah kerapatan jalannya cenderung tinggi pula. Provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Nusa Tenggara Timur relatif lebih baik

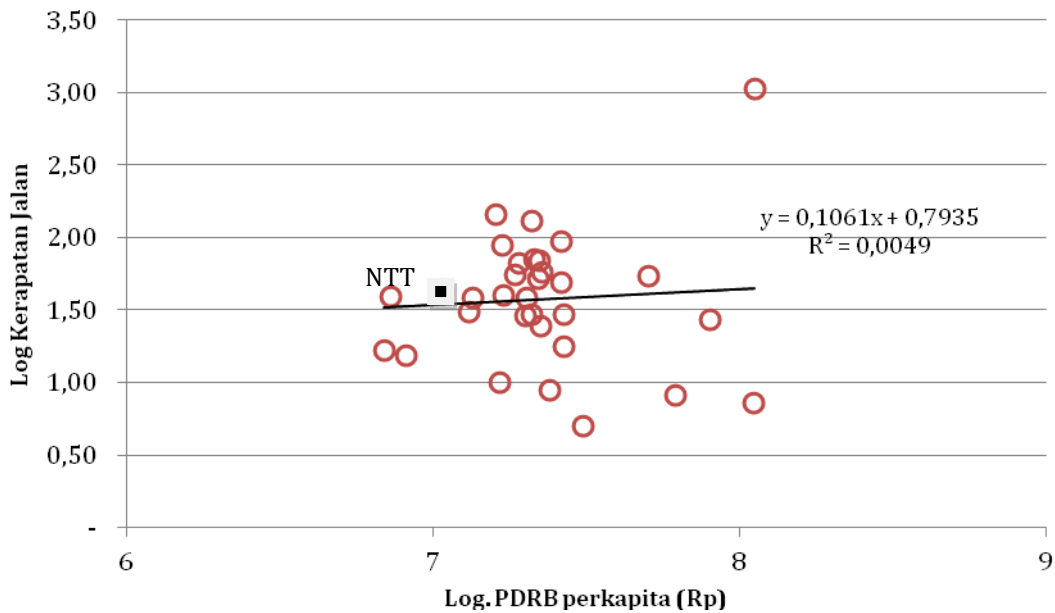
dibandingkan provinsi lain. Dengan demikian panjang jalan bukan merupakan permasalahan utama bagi Nusa Tenggara Timur

**Tabel 6**  
**Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012**

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
<b>17</b>	<b>NTT</b>	<b>7.236</b>	<b>39,95</b>
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
<b>Indonesia</b>		<b>33.531</b>	<b>25,99</b>

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

**Gambar 10**  
**Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012**



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Secara kualitas, kondisi jalan di Nusa Tenggara Timur relatif baik, ditunjukkan dari panjang jalan yang sudah beraspal di provinsi ini. Permukaan jalan beraspal di Maluku sudah mencapai 81 persen pada tahun 2012 (Tabel 7), menunjukkan daya dukung jalan untuk pergerakan barang relatif baik. Kondisi jalan yang buruk akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan biaya distribusi barang antar daerah, yang pada gilirannya menghambat perekonomian daerah. Dengan adanya perbedaan kapasitas fiskal antardaerah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan integrasi jaringan jalan antarwilayah.

**Tabel 7**  
**Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012**

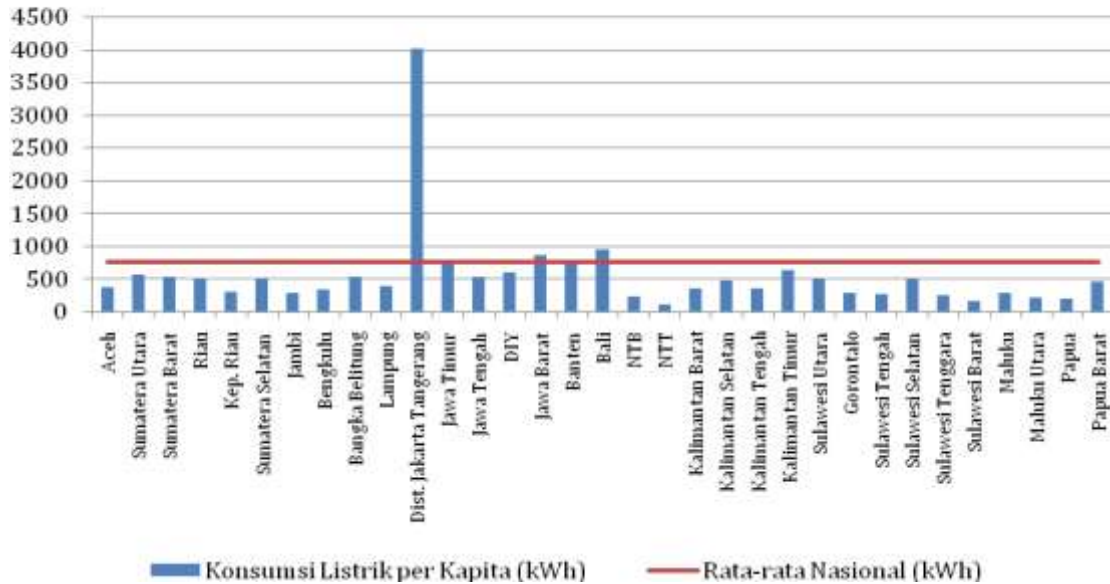
PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN									
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya		Total	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
NTT	1.414	81	185	11	130	7	8	1	1.737	100
Nusa Tenggara	2.912	81	383	11	268	7	17	1	3.580	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

Sumber: BPS, 2012

Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Nusa Tenggara Timur termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 753,7 kWh (Gambar 11). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita. Terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12).

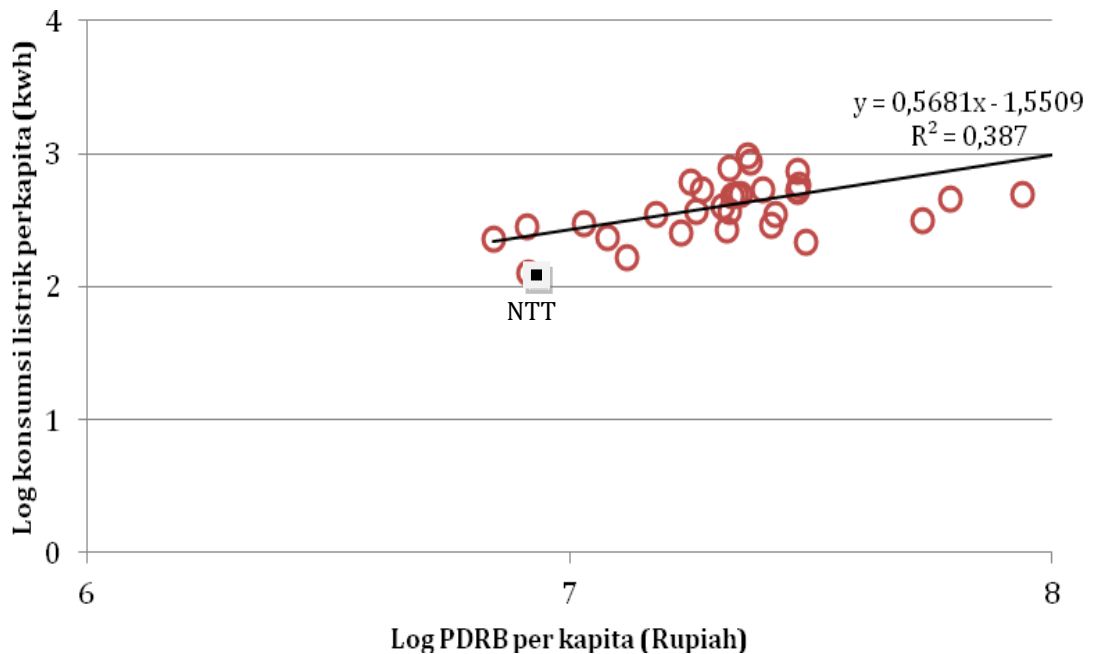
Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik.

**Gambar 11**  
**Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013**



Sumber: Statistik PLN, 2013

**Gambar 12**  
**Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013**



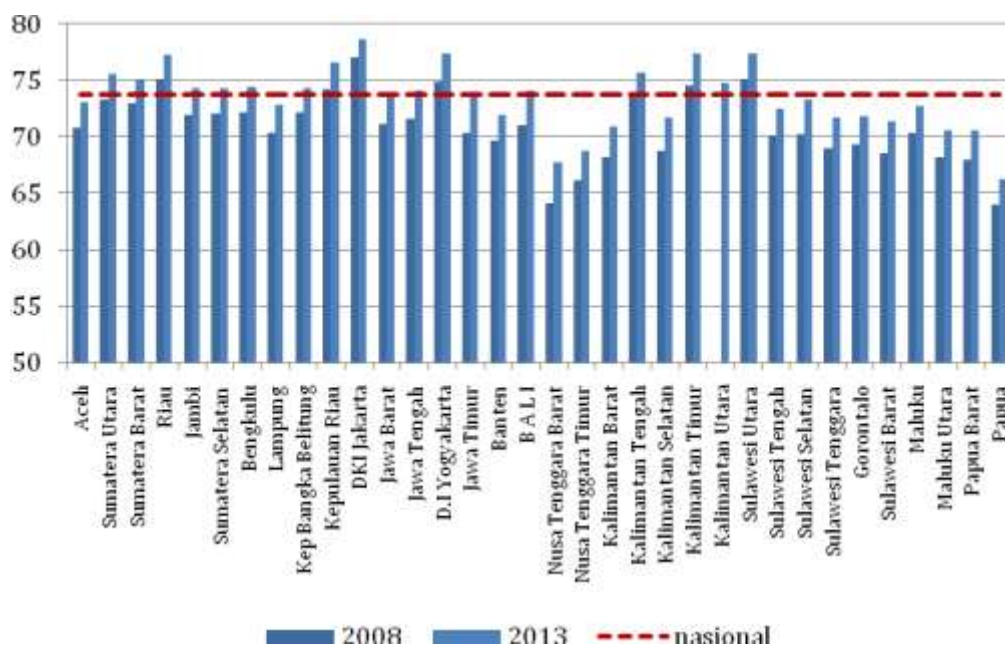
Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

### 5. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 namun masih jauh di bawah IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13).

IPM Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat ke-32 secara nasional pada tahun 2013 dengan nilai IPM sebesar 68,77. Nilai IPM ini merupakan terendah ketiga setelah Papua dan Nusa Tenggara Barat. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari angka 67,0 tahun pada tahun 2008 menjadi 68,05 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di NTT meningkat dari 6,55 tahun pada 2008 menjadi 7,16 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di NTT pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 87,66 menjadi 90,34 persen, lebih rendah dari angka nasional sebesar 94,14.

**Gambar 13**  
**Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013**



Sumber: BPS, 2013

Perbaikan kualitas sumber daya manusia juga tercermin dari komposisi angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 17,64 persen pada tahun 2008 menjadi 22,43 persen



pada tahun 2014. Perbaikan kualitas angkatan kerja ini menjadi modal berharga untuk mendukung industrialisasi berbasis pertanian.

**Tabel 8**  
**Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan**

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014	Perubahan
1	≤ SD	1.525.029	1.582.325	57.296
2	SMTP	259.470	266.207	6.737
3	SMTA Umum	296.018	364.521	68.503
5	Diploma I/II/III/Akademi	40.395	55.081	14.686
6	Universitas	46.007	114.982	68.975
<b>Total</b>		<b>2.166.919</b>	<b>2.383.116</b>	<b>216.197</b>

Sumber: BPS, 2014

## 6. Rendahnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat adalah tabungan masyarakat. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi.

Rasio pinjaman terhadap simpanan di Nusa Tenggara Timur nilainya lebih kecil dari satu, menunjukkan terbatasnya potensi simpanan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, atau terdapat keterbatasan tabungan sebagai sumber modal masyarakat. Sebagai perbandingan, rasio pinjaman terhadap simpanan untuk nasional sebesar 0,92 menunjukkan sumber permodalan masyarakat secara nasional cukup memadai (Tabel 9).

**Tabel 9**  
**Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013**

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
NTT	16.225	15.819	0,97	0,50
Nusa Tenggara	30.926	39.165	1,27	
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92	0,47

Sumber:

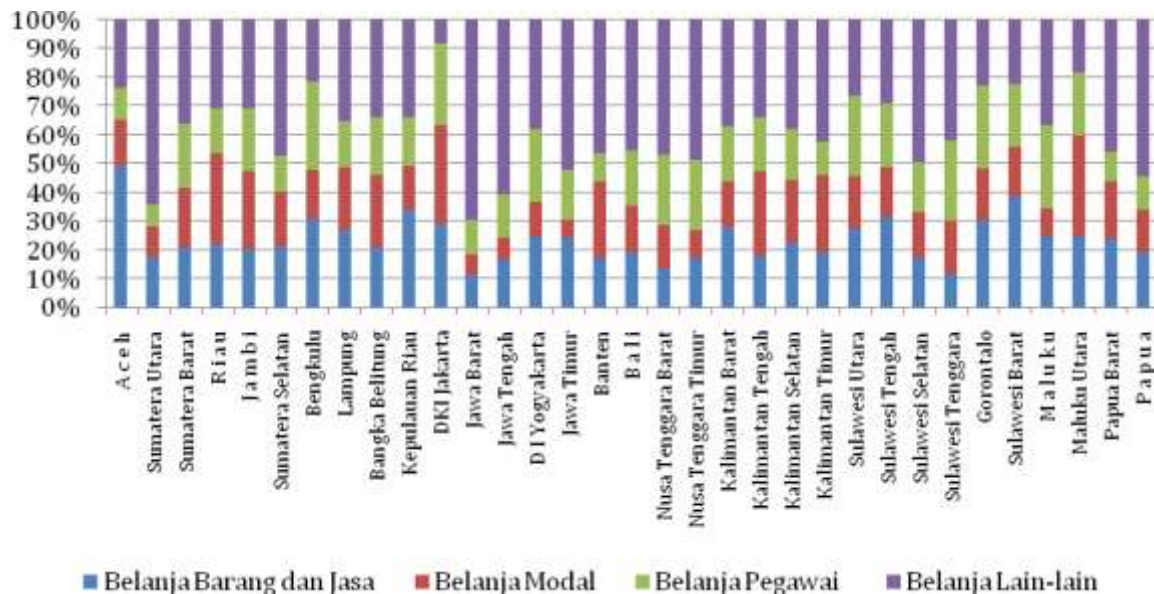
Rasio PMTB terhadap simpanan di Nusa Tenggara Timur nilainya kurang dari satu, menunjukkan potensi simpanan masyarakat masih memenuhi untuk pembiayaan investasi di daerah. Hal ini mengindikasikan sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur bersifat konsumtif. Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat pada sektor produktif, selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat.

## 7. Kualitas Belanja Daerah

Investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat *non excludable* dan *non rivalry* memiliki peran yang tidak tergantikan dibandingkan dengan peran swasta. Peran pemerintah semakin penting di daerah-daerah relatif tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM). Tanpa itu, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang.

Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan investasi publik dapat ditunjukkan melalui rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Nusa Tenggara Timur. Rasio belanja modal di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2013 sebesar 9,70 persen dan rasio belanja pegawai sebesar 24,21 persen (Gambar 14). Apabila anggaran pada belanja publik lebih diorientasikan pada belanja modal akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

**Gambar 14**  
**Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013**



Sumber: BPS, 2013

## D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Perekonomian wilayah Nusa Tenggara Timur relatif tertinggal namun prospek pertumbuhan daerah cukup baik bila dilihat dari beberapa modal pembangunan yang dimiliki, antara lain posisi geografis NTT yang dekat dengan Bali. Untuk mendukung potensi pariwisata di provinsi ini diperlukan dukungan infrastruktur yang baik. Modal pembangunan lain yang dimiliki NTT adalah komoditas unggulan pada bahan pangan, perikanan, dan produksi garam sebagai penggerak perekonomian daerah.

Berdasarkan pada kinerja pembangunan selama ini serta modal pembangunan yang dimiliki dapat digambarkan prospek NTT dalam mencapai target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 6,0 – 9,5 persen dapat tercapai. Perekonomian Nusa Tenggara Timur relatif stabil tahun 2014 dan akan meningkat pada tahun 2015. Hal ini didukung dengan meningkatnya aktivitas pertanian dan pertambangan secara keseluruhan. Investasi di Nusa Tenggara Timur perlu ditingkatkan melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan perekonomian daerah. .
2. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan agar sesuai dengan Buku III RPJMN 2015-2019. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 18,4 – 12,9 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 20,0 persen. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Nusa Tenggara Barat harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 7,1 poin persentase atau 1,18 poin persentase per tahun.

## **E. Penutup**

### **1. Isu Strategis Daerah**

Dari hasil analisis di atas dapat dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan daerah yang disaring berdasarkan kriteria: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada sasaran-sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

- a. Pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan sektor pertanian
- b. Pengembangan lapangan kerja berkualitas
- c. Perbaikan iklim investasi daerah
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan
- e. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan
- f. Peningkatan alokasi belanja modal pemerintah daerah

### **2. Rekomendasi Kebijakan**

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
2. Pemberdayaan petani, peternak, dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses input produksi (pupuk, benih, pestisida, bibit unggul) termasuk peningkatan jaringan irigasi;

3. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
4. Perbaikan kualitas jaringan jalan;
5. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah;
6. Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata unggulan
7. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah.
8. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: pengendalian inflasi daerah dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah.